

BAB II

TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP)

Awal dari terbentuknya perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah karena kekecewaan beberapa negara terhadap perjanjian APEC yang dinilai telah gagal dalam meliberalisasikan perdagangan. Maka dari itu, dibentuklah sebuah perjanjian yang dirancang lebih mengikat serta lebih komprehensif dan juga berstandart tinggi dari pada perjanjian *Free Trade Area* (FTA) lainnya. Bahkan perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dikenal sebagai suatu model perjanjian Abad ke 21. Kendati demikian terdapat 30 bab pembahasan liberalisasi perdagangan dalam perjanjian tersebut.

Pada bab ini berisi tentang awal mula terbentuknya perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan perkembangannya, serta isi dari perjanjian tersebut. Disamping itu bab ini juga menjelaskan bagaimana gambaran hubungan Indonesia dengan TPP.

2.1 Trans-Pacific Partnership (TPP)

2.1.1 Sejarah Perkembangan Trans-Pacific Partnership (TPP)

Cikal bakal kemunculan *Trans-Pacific Partnership* dengan kemunculan *Pacific Four* atau biasa dikenal dengan sebutan P4 yakni Singapura, Chile, New Zealand dan Brunei Darussalam yang menandatangani kesepakatan kerjasama

buruh dan perjanjian kerjasama TPSEP di Wellington yang menghubungkan Asia, Pasifik dan juga Amerika pada tahun 2006.²⁸ Tujuan dari terbentuknya perjanjian *Pacific Four* ini adalah untuk membuat perjanjian perdagangan yang lebih besar di kawasan Pasifik sebagai bentuk implementasi liberalisasi perdagangan diantara negara anggota *Pacific Four*. Dapat dikatakan dengan kehadiran *Pacific Four* yang semakin menarik diperbincangkan dalam pembahasan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) mengingat *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) sendiri merupakan forum kerjasama ekonomi yang menjadikan isu integrasi ekonomi kawasan sebagai salah satu agenda utama.²⁹

Secara garis besar rancangan dari kehadiran perjanjian *Pacific Four* memberikan gambaran mengenai bentuk latar belakang, instrumen, konsep, dan tujuan liberalisasi perdagangan. Beberapa negara dikawasan lain menaruh perhatian terhadap perjanjian ini sehingga kemudian satu persatu negara anggota *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) seperti, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, dan Malaysia memutuskan untuk bergabung dalam perjanjian ini. Hingga kemudian negara-negara anggota *Asia Pacific Economic*

²⁸ *Ibid*, diakses dalam <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/p4/> (15/9/2018, 19:45 WIB)

²⁹ Kemlu, *Trans-Pacific Partnership (TRANS PACIFIC PARTNERSHIP) dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik*, Kementerian Luar Negeri Indonesia, di akses dalam [https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Trans-Pacific-Partnership-TRANS PACIFIC PARTNERSHIP-dan-Proses-Integrasi-Ekonomi-Kawasan-Asia-Pasifik.aspx](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Trans-Pacific-Partnership-TRANS-PACIFIC-PARTNERSHIP-dan-Proses-Integrasi-Ekonomi-Kawasan-Asia-Pasifik.aspx) (02/12/2017, 01:00 WIB)

Cooperation (APEC) lainnya seperti Jepang, Kanada, dan Filipina juga mulai berancang-ancang untuk bergabung dalam perjanjian ini.³⁰

Pada tahun 2008, Vietnam, Peru dan Australia mulai bergabung namun disini Amerika Serikat hanya menunjukkan ketertarikan hingga pada akhirnya Amerika Serikat turut bergabung pada tahun yang sama. Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dengan *Pacific Four* dan *Pacific Four* pun berganti nama menjadi *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* sebagai sebuah bentuk dari perjanjian yang baru. Tujuan dari pengubahan nama dari *Pacific Four* menjadi TPSEP ini sendiri adalah untuk memperluas jangkauan keanggotaan. Perjanjian *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* pada akhirnya memiliki 9 anggota yang mana merupakan anggota *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Sebagai bentuk perjanjian yang berstandart tinggi TPSEP membentuk sebuah badan pengawasan *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Commission* yang bertujuan untuk bertanggung jawab atas administrasi perjanjian. Sementara itu terbentuknya badan ini mempunyai kuasa untuk membuat suatu pertemuan di tingkat menteri atau sekelas pejabat-pejabat senior yang mampu merepresentasikan dari negara-negara anggota perjanjian. Adapun tujuan utama terbentuknya badan ini sebenarnya untuk mengawasi kinerja komite kerja yang dinaungi oleh perjanjian *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP)

³⁰ *Ibid*

seperti bertanggung jawab atas implementasi perjanjian, penelaahan kesepakatan, pertimbangan jika terdapat proposal untuk melakukan amandemen, menentukan langkah-langkah untuk melakukan ekspansi perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan mengidentifikasi area kerjasama komersial, industri, dan teknis, serta mempertimbangkan segala hal yang dapat mempengaruhi operasi perjanjian perdagangan ini.³¹

Hingga kemudian pada tahun 2012, Kanada dan Meksiko bergabung dengan *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* serta pada tahun 2013 Jepang bergabung dengan *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership*. Pasca bergabungnya Kanada, Meksiko dan Jepang pada akhirnya perjanjian pun dinamakan sebagai *Trans-Pacific Partnership* atau yang lebih dikenal dengan TPP. Perubahan nama dari *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) menjadi TPP ini sendiri dikarenakan Amerika Serikat bergabung menjadi anggota dan mengusulkan negosiasi mengenai perjanjian baru yang disebut sebagai TPP. Terdapat alasan juga mengapa Amerika Serikat bersikap demikian, hal ini diakibatkan Tiongkok muncul sebagai sebuah negara *global power* yang mana disini Tiongkok menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di

³¹ Andri, 2013, *Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans-Pacific Partnership Periode 2011-2013*, Sripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal 38

Asia dan hal ini jika dibiarkan maka akan merugikan pekerja dan bisnis Amerika Serikat.³²

Trans-Pacific Partnership merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas diantara 12 negara yakni Australia, New Zealand, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam yang bertujuan untuk membangun perjanjian regional yang komprehensif yang memajukan integrasi ekonomi untuk perdagangan bebas dan investasi serta membawa pertumbuhan ekonomi dan sosial, menciptakan kesempatan kerja baru dan kesempatan bisnis yang baru.³³

Maka dari itu tidak heran bahwa Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menjadi perekonomian terbesar karena perjanjian ini mengklaim mencakup 40 persen dari total *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.³⁴ Beranggotakan 12 negara meliputi Australia, Brunei Darusaalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam membuat *Trans-Pacific Partnership* merupakan sebuah perjanjian yang dirancang dengan berstandart tinggi, ambisius, komphrehensif dan seimbang serta bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

³² Kompas, *Apa Alasan AS 'Membajak' Trans-Pacific Partnership*, diakses dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.Trans-Pacific.Partnership> (24/9/2018, 20:24 WIB)

³³ New Zealand Foreign Affairs & Trade, *Trans Pacific Partnership*, diakses dalam <https://www.Trans-Pacific.Partnership.mfat.govt.nz/> (29/8/2018, 23:34 WIB)

³⁴ *The Trans-Pacific Partnership and Taiwan's Place in the Broader East-Asian Regionalism: Some Political-Economy and Strategic Consideration*, 2014 Hal 5 dalam Kementerian Perdagangan, *Analisis Regulasi E-Commece di Indonesia Terhadap Trans Pacific Partnership (TPP)*, Laporan Akhir, Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri 2016 Hal 7

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan inovasi, produktifitas dan daya saing, meningkatkan standart hidup, mengurangi kemiskinan, dan juga mempromosikan transparansi, tata pemerintahan pemerintah yang baik, serta peningkatan perlindungan terhadap buruh dan lingkungan. Hal ini dapat dibayangkan karena landasan awal dari terbentuknya *Trans-Pacific Partnership* ialah sebagai bentuk perjanjian perdagangan dan investasi baru yang menghubungkan kawasan-kawasan di Asia Pasifik.³⁵

Tabel 2 Negara-Negara Tergabung TPP (Sumber: Diolah dari berbagai sumber)³⁶

| N o | Countr y | Status 2005 Agree ment | Signat ure of TPP | Ratifica tion of TPP | Start of TPP Negotiat ions | Signat ure | Entry into Forces | Withdr awn |
|--------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Australi a | Non- Party | 4 Februa ry 2016 | | Novemb er 2008 | 2008 | | |
| 2 | Brunei Darussa lam | Party(2 8 May 2006) | 4 Februa ry 2016 | | February 2008 | 2 August 2005 | 29 July 2009 | |

³⁵ Office Of the United States Trade representative, *Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement*, diakses dalam <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership> (03/12/2017, 06:00 WIB)

³⁶ CNN, *Trump Signs Order Withdrawing from TPP, Reinstate 'Mexico City Policy' on Abortion*, diakses dalam <https://edition.cnn.com/2017/01/23/politics/trans-pacific-partnership-trade-deal-withdrawal-trumps-first-executive-action-monday-sources-say/>; Global Affairs Canada, *Canada Joins Trans-Pacific Partnership Round*, diakses dalam http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/news-communiques/2012/12/03a.aspx?lang=eng&view=d; BBC News, *Trans Pacific Partnership Trade Deal Signed in Auckland*, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/business-35480600> (14/9/2018, 01:34 WIB)

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| 3 | Canada | Non-Party | 4 February 2016 | | October 2012 | 2008 | | |
| 4 | Chile | Party (8 November 2006) | 4 February 2016 | | February 2008 | 18 July 2005 | 8 November 2006 | |
| 5 | Japan | Non-Party | 4 February 2016 | 20 January 2017 | May 2013 | 2008 | | |
| 6 | Malaysia | Non-Party | 4 February 2016 | | October 2010 | 2008 | | |
| 7 | Mexico | Non-Party | 4 February 2016 | | October 2012 | 2008 | | |
| 8 | New Zealand | Party (12 July 2006) | 4 February 2016 | 11 May 2017 | | | | |
| 9 | Peru | Non-Party | 4 February 2016 | | November 2008 | 2008 | | |
| 10 | Singapore | Party (28 May 2006) | 4 February 2016 | | | 18 July 2005 | 1 May 2006 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------------------|--|------------------|------|--|-----------------------|
| 1 1 | United States | Non-Party | 4 February 2016 | | February 2008 | 2008 | | 23 January 2017 |
| 1 2 | Vietnam | Non-Party | 4 February 2016 | | November 2008 | 2008 | | |

Dalam perjanjian *Trans-Pacific Partnership* terdapat sebuah fitur utama ataupun keistimewaan yang mana menjadikan *Trans-Pacific Partnership* menjadi hal yang bersejarah pada abad 21 dikarenakan akses pasar komprehensif, komitmen pendekatan regional, mengatasi tantangan perdagangan baru, perdagangan inklusif serta tempat untuk integrasi regional.³⁷ *Pertama* adalah mengenai akses pasar komprehensif yang mana dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* nantinya akan menghilangkan ataupun mengurangi hambatan *tariff* maupun hambatan *non tariff* dalam perdagangan barang ataupun jasa dan mencakup penuh aspek perdagangan termasuk investasi barang dan jasa sehingga menciptakan peluang dan juga manfaat baru bagi bisnis, pekerja dan konsumen.

Kedua, adalah komitmen pendekatan regional yang mana *Trans-Pacific Partnership* memfasilitasi pengembangan produksi dan distribusi barang produksi, memperlancar perdagangan, meningkatkan efisiensi dan mendukung

³⁷ Office of the United States Trade Representative, *Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement*, diakses dalam <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership> (01/09/2018, 9:40 WIB)

tujuan untuk menciptakan dan mendukung pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan upaya-upaya konservasi, memfasilitasi integrasi lintas batas serta membuka pasar domestik. *Ketiga* mengenai mengatasi tantangan perdagangan baru yang mana *Trans-Pacific Partnership* mempromosikan inovasi, produktivitas dan daya saing mengenai isu-isu baru, termasuk perkembangan ekonomi digital, serta peran perusahaan milik Negara dalam ekonomi global.

Keempat mengenai perdagangan inklusif yang mana *Trans-Pacific Partnership* mencakup unsur-unsur baru dan memastikan bahwa ekonomi di semua tingkat pembangunan dan bisnis dari semua ukuran dapat memberikan keuntungan dalam perdagangan. Hal ini termasuk membantu usaha bisnis kecil hingga bisnis menengah untuk memahami perjanjian, memanfaatkan peluang dan membawa tantangan-tantangan unik sehingga menjadi perhatian dari pemerintah *Trans-Pacific Partnership*. Selain itu komitmen pada pembangunan dan pengembangan kapasitas perdagangan yang mana hal ini berguna untuk memastikan semua pihak dapat mencapai kesepakatan dalam perjanjian serta mendapatkan keuntungan penuh dari perjanjian. *Kelima* mengenai TPP sebagai tempat integrasi regional yang mana *Trans-Pacific Partnership* dimaksudkan sebagai tempat untuk integrasi ekonomi regional dan dirancang untuk menambahkan kegiatan perekonomian baru di kawasan Asia Pasifik.

Trans-Pacific Partnership disini memiliki cakupan yang mana terdiri dari beberapa hal seperti Cakupan 30 Bab mengenai perdagangan dan isu perdagangan; memperbarui pendekatan tradisional yang dicakup dalam perdagangan bebas sebelumnya (FTAs) dan juga TPP menyatukan berbagai kelompok negara berdasarkan geografi, bahasa, sejarah maupun tingkat pembangunan.³⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya *Trans-Pacific Partnership* terdiri dari 30 Bab yang mana termasuk perjanjian yang berkaitan dengan barang dan jasa, investasi, pengadaan pemerintah, pemasukan sementara pelaku bisnis. Oleh karena itu, terdapat aturan perdagangan regional yang diatur dalam 30 bab *Trans-Pacific Partnership* yang mana meliputi ketentuan awal dan definisi umum, perdagangan barang, tekstil dan pakaian, ketentuan asal barang, administrasi bea cukai dan fasilitasi perdagangan, aturan sanitari dan *phytosanitary*, hambatan teknis perdagangan, perbaikan perdagangan, investasi, layanan perdagangan lintas batas, pelayanan keuangan, *temporary entry* untuk pelaku bisnis, telekomunikasi, pengadaan pemerintah, kebijakan persaingan, perusahaan milik negara dan *designated monopolies*, hak milik *intellectual*, tenaga kerja, lingkungan hidup, kerjasama dan pengembangan kapasitas, persaingan dan fasilitas bisnis, pengembangan, usaha kecil dan menengah, *regulatory coherence*, transparansi dan antikorupsi,

³⁸ *Ibid*

ketentuan administrasi dan institusional, penyelesaian sengketa, pengecualian serta mengenai ketentuan akhir.³⁹

Pertama mengenai ketentuan awal dan definisi umum yang mana *Trans-Pacific Partnership* dapat hidup berdampingan dengan perjanjian perdagangan internasional lainnya, termasuk perjanjian WTO, perjanjian bilateral dan juga perjanjian regional. *Kedua* mengenai perdagangan barang yang mana anggota *Trans-Pacific Partnership* setuju untuk menghilangkan hambatan *tariff* maupun *non-tariff* terhadap barang-barang *industry* dan juga menghilangkan ataupun mengurangi *tariff* dan kebijakan pembatasan lainnya terhadap barang pertanian. Jika Negara yang tergabung *Trans-Pacific Partnership* mempertahankan persyaratan impor maka akan diberitahukan tentang prosedur untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi arus perdagangan.

Pada produk pertanian, pihak tergabung *Trans-Pacific Partnership* akan menghilangkan ataupun mengurangi *tariff* dan kebijakan restriktif lainnya yang mana hal ini akan meningkatkan perdagangan pertanian di wilayah tersebut dan juga akan meningkatkan ketahanan pangan. Pihak *Trans-Pacific Partnership* juga akan mempromosikan reformasi kebijakan termasuk juga menghilangkan subsidi ekspor pertanian, bekerjasama dengan WTO dalam mengembangkan disiplin pada perusahaan perdagangan ekspor Negara, kredit ekspor serta memberikan batasan waktu ekspor makanan guna memberikan keamanan

³⁹ *ibid*

pangan yang lebih besar. Anggota *Trans-Pacific Partnership* juga sepakat untuk meningkatkan transparansi dan kerjasama pada kegiatan-kegiatan yang terkait bioteknologi pangan.

Ketiga mengenai tekstil dan pakaian yang mana anggota *Trans-Pacific Partnership* setuju menghapuskan tariff pada tekstil dan pakaian jadi. Bab ini juga menyangkut aturan spesifik yang mengharuskan penggunaan benang dan kain dari Negara anggota *Trans-Pacific Partnership* yang mana hal ini bertujuan untuk mempromosikan rantai pasokan regional dan investasi pada sektor tekstil dan pakaian jadi. Selain itu, Bab ini menyakup komitmen pada kerjasama bea cukai dan penegakan aturan untuk mencegah penghindaran tugas, penyelundupan dan penipuan serta perlindungan khusus tekstil dalam menanggapi kerusakan serius ataupun ancaman kerusakan serius pada industri domestik jika tiba-tiba terjadi lonjakan impor.

Keempat mengenai ketentuan asal barang yang mana *Trans-Pacific Partnership* menerapkan aturan untuk memastikan bisnis dapat mudah beroperasi di seluruh wilayah *Trans-Pacific Partnership* dengan menciptakan sistem *Trans-Pacific Partnership* untuk menunjukkan dan memverifikasi barang yang dibuat oleh *Trans-Pacific Partnership* memenuhi standar asal. Importir akan dapat mengklaim perlakuan tariff preferensial selama memiliki dokumentasi untuk mendukung klaim yang diajukan.

Kelima mengenai administrasi bea cukai dan fasilitasi perdagangan yang mana dalam melengkapi upaya yang dilakukan oleh WTO dalam fasilitasi

perdagangan, pihak *Trans-Pacific Partnership* menyetujui peraturan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, meningkatkan transparansi dalam prosedur bea cukai, serta memastikan integritas dalam administrasi bea cukai. Aturan-aturan ini tentunya akan membantu bisnis *Trans-Pacific Partnership*, termasuk usaha kecil dan menengah dengan mendorong kelancaran prosedur bea cukai dan perbatasan serta mempromosikan rantai pasokan regional. *Trans-Pacific Partnership* menyetujui aturan-aturan hukum dalam bea cukai yang mana hukuman yang diberikan tidak memihak dan transparan. Pihak *Trans-Pacific Partnership* setuju memberikan informasi ketika diminta untuk dapat saling menegakkan hukum kepabean masing-masing.

Keenam mengenai aturan sanitari dan *phytosanitary* yang mana dalam mengembangkan aturan ini, pihak *Trans-Pacific Partnership* akan meningkatkan minat bersama dalam memastikan peraturan yang transparan dan tidak diskriminatif berdasarkan *science*, dan menegaskan kembali hak mereka untuk melindungi kehidupan ataupun kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuhan di negara mereka. Pihak *Trans-Pacific Partnership* berkomitmen untuk meningkatkan pertukaran informasi yang terkait dengan permintaan kesetaraan atau regionalisasi dan mempromosikan pengawasan berbasis sistem untuk menilai efektivitas pengendalian aturan dari pihak pengeskor.

Ketujuh mengenai hambatan teknis perdagangan yang mana dalam mengembangkan aturan ini, pihak *Trans-Pacific Partnership* menyetujui peraturan yang transparan dan tidak diskriminatif untuk mengembangkan

peraturan teknis, standard prosedur penilaian kesesuaian dan juga mempertahankan kemampuan pihak *Trans-Pacific Partnership* untuk memenuhi tujuan yang sah. Pihak *Trans-Pacific Partnership* setuju bekerjasama dalam memastikan bahwa peraturan dan standar teknis tidak menciptakan hambatan perdagangan. *Trans-Pacific Partnership* juga mencakup aturan-aturan sektor khusus untuk mempromosikan pendekatan pengaturan umum di seluruh wilayah *Trans-Pacific Partnership*. Sektor ini adalah sektor kosmetik, peralatan medis, farmasi, produk teknologi informasi dan komunikasi, anggur dan *distilled spirits*, produk pertanian organik.

Kedelapan mengenai perbaikan perdagangan yang mana pada bab ini cenderung untuk mempromosikan transparansi dan proses hukum dalam proses perbaikan perdagangan melalui pengakuan praktik terbaik tetapi tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak *Trans-Pacific Partnership* dibawah WTO. Pada bab ini juga mengatur mekanisme perlindungan transisional yang mana memungkinkan suatu pihak untuk menerapkan tindakan pengamanan transisional selama periode waktu tertentu apabila impor meningkat akibat pemotongan tarif yang dilaksanakan dibawah *Trans-Pacific Partnership*.

Kesembilan mengenai investasi yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* menetapkan peraturan yang mensyaratkan kebijakan dan perlindungan non-diskriminatif yang menjamin perlindungan hukum aturan-aturan dasar, sekaligus melindungi kemampuan Pemerintah anggota *Trans-Pacific Partnership* dalam mencapai tujuan kebijakan publik yang sah. *Trans-Pacific*

Partnership memberikan perlindungan investasi dasar. Bab ini juga menyediakan arbitrase internasional yang netral dan transparan dari persengketaan investasi dengan perlindungan yang kuat serta memastikan hak pemerintah untuk mengatur demi kepentingan publik termasuk kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Kesepuluh mengenai layanan perdagangan lintas batas yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* setuju untuk mengatur langkah-langkah penerapan umum dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak serta menerima persyaratan transparansi dalam pengembangan peraturan layanan baru. Bab ini juga mencakup lampiran-lampiran pelayanan profesional yang mendorong kerjasama dalam permasalahan regulasi dan perizinan serta lampiran pelayanan pengiriman ekspres.

Kesebelas mengenai pelayanan keuangan yang mana bab ini mencakup kewajiban inti yang ditemukan dalam perjanjian perdagangan lainnya termasuk perlakuan nasional. Perlakuan bangsa yang paling disukai, akses pasar serta ketentuan-ketentuan tertentu dibawah bab investasi termasuk standar minimum perawatan. Anggota *Trans-Pacific Partnership* dapat memberikan layanan keuangan baru di pasar *Trans-Pacific Partnership* jika perusahaan domestik di pasar mengizinkan hal tersebut. Pihak *Trans-Pacific Partnership* memiliki pengecualian khusus terhadap aturan yang tertera di *Trans-Pacific Partnership* yakni: (1) menerima kewajiban untuk tidak membuat langkah-langkah yang lebih ketat di masa depan dan mengikat liberalisasi apapun di masa akan

datang, serta (2) menyiapkan langkah-langkah dan kebijakan dimana Negara mempertahankan penuh kebijaksanaan di masa depan.

Pihak *Trans-Pacific Partnership* juga mencakup komitmen khusus pada manajemen portofolio, layanan kartu pembayaran elektronik serta transfer informasi untuk pemrosesan data. Bab ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan arbitrase investasi yang netral dan juga transparan.

Keduabelas mengenai *temporary entry* untuk pelaku-pelaku bisnis yang mana bab ini mendorong pihak berwenang dalam *Trans-Pacific Partnership* untuk memberikan informasi mengenai aplikasi-aplikasi untuk *temporary entry*, untuk memastikan bahwa biaya mengajukan masuk akal, serta membuat keputusan tentang pengajuan dan penginformasian secara cepat dan *online*. Hampir semua pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) membuat komitmen mengenai akses untuk masing-masing pebisnis yang berada dalam lampiran-lampiran khusus Negara.

Ketigabelas mengenai telekomunikasi yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* memiliki kepentingan untuk memastikan jaringan telekomunikasi yang efisien dan andal di negara mereka. Jaringan sangat penting untuk perusahaan besar dan kecil guna menyediakan layanan. Pihak *Trans-Pacific Partnership* berkomitmen untuk memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi menyediakan layanan interkoneksi, sewa *circuit services*, *co-location*. *Trans-Pacific Partnership* juga setuju untuk mempromosikan

persaingan dalam layanan *roaming* internasional dan memfasilitasi penggunaan *roaming* internasional.

Keempatbelas mengenai perdagangan elektronik yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* berkomitmen untuk memastikan aliran bebas dari informasi global dan data yang mendorong internet dan ekonomi digital serta pemenuhan dalam perlindungan informasi pribadi. Pihak-pihak terkait juga harus memiliki langkah untuk menghentikan iklan pesan elektronik yang tidak diminta. Bab ini mendorong kerjasama pada kebijakan mengenai perlindungan informasi pribadi, perlindungan konsumen *online*, ancaman *cyber security* dan kapasitas *cyber security*.

Kelimabelas mengenai pengadaan pemerintah yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* berkomitmen terhadap perlakuan nasional dan tidak mendiskriminasi. *Trans-Pacific Partnership* juga setuju untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara tepat waktu. *Keenambelas* mengenai kebijakan persaingan yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* memiliki kepentingan untuk memastikan kerangka kerja kompetisi yang adil di kawasan melalui aturan yang mengharuskan *Trans-Pacific Partnership* mempertahankan rezim hukum yang melarang perilaku bisnis anti persaingan serta kegiatan iklan penipuan dan menipu yang mana hal ini dapat merugikan konsumen. *Trans-Pacific Partnership* setuju untuk membentuk atau mempertahankan otoritas yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum persaingan nasional, serta mengadopsi ataupun mempertahankan undang-

undang atau peraturan yang melarang kegiatan curang dan menipu yang menyebabkan ancaman bahaya terhadap konsumen.

Ketujuhbelas mengenai perusahaan milik Negara dan *designated monopolies* yang mana para pihak setuju untuk memastikan bahwa BUMN melakukan pembelian dan penjualan komersial berdasarkan pertimbangan komersial, kecuali hal tersebut tidak dilakukan dengan konsisten dimana BUMN yang beroperasi mengharuskannya menyediakan layanan publik. Para pihak setuju dengan memastikan badan administratif yang mengatur BUMN ataupun perusahaan swasta dilakukan dengan cara tidak memihak. Pihak *Trans-Pacific Partnership* setuju tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pihak lainnya dalam memberikan bantuan non komersial pada BUMN ataupun melukai industri domestik pihak lainnya dengan memberikan bantuan non komersial pada BUMN yang memproduksi dan menjual barang di wilayah pihak lain.

Kedelapanbelas mengenai hak milik *intellectual* yang mana bab ini mencakup hak paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, bentuk-bentuk lain dari kekayaan intelektual dan penegakan hak kekayaan intelektual serta area dimana para pihak setuju untuk bekerjasama. Pihak *Trans-Pacific Partnership* setuju dalam memberikan sistem penegakan hukum yang kuat termasuk halnya prosedur perdata, tindakan-tindakan sementara, tindakan perbatasan, dan prosedur pidana serta hukuman untuk pemalsuan merk dagang skala komersial dan hak cipta atau pembajakan.

Kesembilanbelas mengenai tenaga kerja yang mana semua pihak *Trans-Pacific Partnership* adalah anggota-anggota *International Labour Organization* (ILO) dan mengakui pentingnya mempromosikan hak-hak buruh yang diakui secara internasional. *Trans-Pacific Partnership* juga setuju untuk memiliki undang-undang yang mengatur upah minimum, jam kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja. *Keduapuluh* mengenai lingkungan hidup yang mana para pihak *Trans-Pacific Partnership* memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk dengan bekerjasama dalam mengatasi tantangan lingkungan, seperti polusi, perdagangan satwa liar secara ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, dan perlindungan lingkungan laut. Pihak *Trans-Pacific Partnership* juga setuju untuk melindungi lingkungan laut dari polusi kapal dan untuk melindungi lapisan ozon dari bahan-bahan perusak lapisan ozon.

Keduapuluh satu mengenai kerjasama dan pengembangan kapasitas yang mana keadaan perekonomian dari 12 negara sangatlah beragam oleh sebab itu dibentuklah sebuah komite kerjasama dan pengembangan kapasitas untuk mengidentifikasi dan meninjau bidang-bidang untuk potensi kerja serta pengembangan kapasitas. Komite ini akan memfasilitasi pertukaran informasi dalam membantu permintaan yang berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan kapasitas. *Keduapuluh dua* mengenai persaingan dan fasilitas bisnis yang mana bab ini menciptakan mekanisme untuk meninjau dampak *Trans-Pacific Partnership* terhadap daya saing parah pihak *Trans-Pacific*

Partnership, melalui dialog antara pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dengan fokus khusus pada pendalaman rantai pasokan regional, untuk menilai kemajuan, mengambil keuntungan dan peluang serta mengatasi tiap tantangan yang muncul setelah *Trans-Pacific Partnership* berlaku.

Keduapuluh tiga mengenai pengembangan yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* berusaha memastikan bahwa *Trans-Pacific Partnership* akan menjadi model standar tinggi untuk perdagangan dan integrasi ekonomi dan khususnya memastikan bahwa semua pihak *Trans-Pacific Partnership* dapat memperoleh manfaat secara penuh dari *Trans-Pacific Partnership* dengan mampu melaksanakan komitmen, serta muncul sebagai masyarakat yang lebih makmur dengan pasar yang kuat. *Keduapuluh empat* mengenai usaha kecil dan menengah yang mana pihak *Trans-Pacific Partnership* berbagi kepentingan terhadap UKM dalam mempromosikan UKM agar dapat mendapatkan keuntungan dari adanya *Trans-Pacific Partnership*.

Keduapuluh lima mengenai *regulatory coherence* yang mana bab ini membantu memastikan lingkungan peraturan yang terbuka, adil dan dapat diprediksi untuk bisnis yang beroperasi di pasar *Trans-Pacific Partnership* dengan mendorong transparansi, ketidakberpihakan, dan koordinasi di setiap pemerintah untuk mencapai pendekatan peraturan yang koheren. *Keduapuluh enam* mengenai transparansi dan antikorupsi yang mana bab ini bertujuan untuk mempromosikan tujuan yang dibagikan oleh semua anggota *Trans-Pacific*

Partnership untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik dan menangani efek korupsi terhadap keadaan perekonomian.

Keduapuluh tujuh mengenai ketentuan administrasi dan institusional yang mana bab ini mengharuskan masing-masing pihak menunjuk suatu titik keseluruhan untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak, dan menciptakan mekanisme yang memiliki periode transisi tertentu untuk suatu kewajiban harus melaporkan rencananya dan melaksanakan kewajiban tersebut.

Keduapuluh delapan mengenai penyelesaian sengketa yang mana para pihak *Trans-Pacific Partnership* akan melakukan setiap upaya guna menyelesaikan persengketaan melalui kerjasama dan konsultasi serta mendorong penggunaan penyelesaian sengketa alternatif jika diperlukan. Ketika hal ini tidak mungkin, pihak *Trans-Pacific Partnership* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui panel yang tidak memihak dan tidak bias.

Keduapuluh Sembilan mengenai pengecualian yang mana bab pengecualian ini memastikan bahwa fleksibilitas tersedia bagi semua pihak *Trans-Pacific Partnership* yang menjamin hak penuh untuk mengatur demi kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan keamanan esensial anggota dan alasan kesejahteraan publik lainnya.

Ketiga puluh mengenai ketentuan akhir yang mana bab ini mendefinisikan cara *Trans-Pacific Partnership* akan mulai berlaku, cara yang dapat diubah, aturan yang menetapkan proses untuk negara-negara lain atau wilayah pabean untuk bergabung dengan *Trans-Pacific Partnership* di masa yang akan datang

yang mana dapat digunakan anggota untuk *withdraw*, dan bahasa asli *Trans-Pacific Partnership*. Hal ini juga berdasarkan perjanjian yang bertanggungjawab untuk menerima dan menyebarluaskan dokumen.

2.2 Indonesia dan *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya *Trans-Pacific Partnership* merupakan perjanjian perdagangan yang berintegritas tinggi yang mana terdapat 12 negara yang bergabung diantaranya New Zealand, Brunei Darussalam, Singapura, Chile, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Mexico, Kanada, Jepang dan juga Amerika Serikat.⁴⁰ Dalam hal ini Negara-negara yang tergabung dengan keanggotaan dari *Trans-Pacific Partnership* tentunya sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk kemajuan Negara terutama dalam bidang perekonomian.

Indonesia merupakan salah satu Negara di Kawasan Asia yang mana membuat Amerika Serikat dalam memperluas hubungannya. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama yang berusaha melebarkan sayap Amerika Serikat berusaha mengajak Indonesia untuk bergabung menjadi anggota dari *Trans-Pacific Partnership*. Barack Obama menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap Indonesia, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan bahwa:

⁴⁰ New Zealand, *Loc. Cit.*

“Obviously I have a very personal interest in Indonesia, given the fact that I spent a bit of time there as a child and have relatives who are Indonesians.”⁴¹

“But what is also true is that our partnership is very much in the interests of the United States, given Indonesia’s large population, its leadership in the region, its democratic traditions, the fact that it is a large Muslim country with a tradition of tolerance and moderation, and its role in trade and commerce and economic development.”⁴²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan ketertarikan Presiden Barack Obama mengenai Indonesia tidak hanya dikarenakan faktor *personal* dari Presiden Barack Obama yang mana saat kecil menghabiskan beberapa waktunya di Indonesia. Faktor lainnya Indonesia memiliki populasi yang besar serta memiliki peranan dalam perdagangan serta perkembangan ekonomi.

Selain itu, Presiden Barack Obama juga mengatakan bahwa:

“Why it’s so important that large countries like ours work together to arrive at the strongest possible set of targets and international agreements when we arrive in Paris just a little over a month from now.”⁴³

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan apabila Amerika Serikat dan juga Indonesia bersatu maka dapat membuat kekuatan yang sangat besar mengingat Amerika Serikat merupakan Negara yang besar dan begitu juga dengan Indonesia.

⁴¹ The Guardian, *Indonesia will Join Trans-Pacific Partnership, Jokowi Tells Obama*, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/27/indonesia-will-join-trans-pacific-partnership-jokowi-tells-obama> (19/9/2018, 04:11 WIB)

⁴² *Ibid*

⁴³ The New York Times, *President Joko Widodo of Indonesia Joins Trans-Pacific Partnership*, diakses dalam <https://www.nytimes.com/2015/10/27/us/politics/president-joko-widodo-of-indonesia-joins-trans-pacific-partnership.html> (19/9/2018, 08:02 WIB)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan KTT APEC November 2011 di Hawaii juga mengatakan:

“Saya tidak mau langsung ikut-ikutan. Bicarakan dulu baik-baik, apa itu TPP? Apa konsekuensi dan keuntungannya bagi rakyat kita”⁴⁴

“Saya penganut free and fair trade. Maka saat banyak yang mengajak free trade, saya sangat hati-hati. Free trade yang dikelola baik, bisa mendatangkan manfaat luar biasa. Belajar pengalaman lalu, saya tidak suka bila setelah UU free trade disahkan timbul masalah.”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak tawaran dari Presiden Barack Obama agar Indonesia bergabung dalam perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kendati demikian, alasan penolakan tersebut karena SBY ingin lebih memahami terlebih dahulu apa latar belakang dari perjanjian tersebut dan apakah menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Karena SBY mengakui bahwasanya dirinya telah menganut sistem *Free ad fair Trade* dan lebih memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk masuk kedalam perjanjian yang berkonsep *Free Trade Area* (FTA).

⁴⁴ Detik Finance, *AS Rayu RI Masuk TPP: SBY Menolak, Jokowi Menerima*, diakses dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3054170/as-rayu-ri-masuk-tpp-sby-menolak-jokowi-menerima> (20/9/2018, 20:01 WIB)

⁴⁵ *ibid*